

KESIAPSIAGAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TERHADAP BENCANA GEMPA BUMI DI KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT

Muh. Ikram

NPP. 30.1588

Asdaf Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

muhammadikram150799@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dra. Rusmini,M.MPd

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Earthquakes are vibrations or shocks that occur on the surface of the earth due to the sudden release of energy from beneath the surface which creates seismic waves. The Regional Disaster Management Agency (BPBD) responsible for disaster management has the main task and function of responding to all types of potential disasters. For Majene Regency to experience frequent earthquakes it does not rule out the possibility that they will recur in the future, so it is important for residents of Majene Regency to be aware of potential disaster hazards, which often happens. **Purpose:** The purpose of this study was to determine the preparedness of regional disaster management agencies for earthquake disasters in Majene Regency, West Sulawesi. **Method:** This research method uses qualitative research with a descriptive approach. Qualitative research has various types of approaches, such as descriptive, verification, and historical approaches. Of the various types of approaches, descriptive qualitative research aims to provide an overview of an existing problem. **Result:** The conclusions from the study indicate several obstacles in the research process, namely the lack of infrastructure, limited budgets, and the need to increase preparedness in dealing with earthquake disasters so that they will be more prepared to act quickly, precisely and effectively and efficiently. **Conclusion:** Efforts made by BPBD in overcoming existing problems and obstacles such as carrying out disaster simulation training programs and Disaster Management Villages, as well as the Rapid Reaction Team, to increase community preparedness for earthquake disasters in Majene Regency.

Keywords: Earthquake, BPBD , Preparedness.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana tersebut yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan terhadap segala jenis potensi bencana, Untuk Kabupaten Majene sering mengalami gempa bumi tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang akan terulang kembali, maka penting bagi penduduk Kabupaten Majene untuk mewaspadaai potensi Bahaya bencana yang sering terjadi. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesiapsiagaan badan penanggulangan bencana daerah terhadap bencana gempa bumi di Kabupaten Majene Sulawesi Barat. **Metode:** Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif memiliki berbagai jenis dalam pendekatan, seperti

pendekatan deskriptif, verifikasi, dan historis. Dari berbagai jenis pendekatan tersebut, penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberi gambaran suatu permasalahan yang ada. **Hasil/Temuan:** Kesimpulan dari penelitian menunjukkan beberapa hambatan dalam proses penelitian yaitu kurangnya sarana prasarana, terbatasnya anggaran, dan perlu ditingkatkan lagi untuk kesiapsiagaannya dalam menangani bencana gempa bumi maka akan semakin siap dalam bertindak cepat, tepat serta efektif dan efisien. **Kesimpulan:** Upaya yang dilakukan BPBD dalam mengatasi permasalahan dan hambatan yang ada seperti melaksanakan program pelatihan simulasi kebencanaan dan Desa tanggu Bencana, serta Tim Reaksi Cepat, untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana gempa bumi di Kabupaten Majene.

Kata kunci: Gempa Bumi, BPBD, Kesiapsiagaan.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pulau Sulawesi, yang dianggap sebagai tempat pertemuan Lempeng Australia, Eurasia, dan Filipina semuanya bertemu di Wilayah Sulawesi sehingga sangat rentan terhadap bencana gempa bumi karena situasi ini. Gempa bumi di wilayah Sulawesi Barat yang mengguncang beberapa lokasi terutama wilayah Kabupaten Majene yang berkekuatan M6,2 pada tanggal 15 Januari 2021 jam 01:28, berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), akibat dari gempa ini adalah rusaknya sejumlah bangunan dan setidaknya banyak orang dilaporkan meninggal dunia. Tidak hanya dari itu gempa di Sulawesi barat menyebabkan kerugian yang berdampak 300 rumah warga rusak, BPBD Sulawesi Barat melaporkan kejadian ini menimbulkan trauma bagi warga.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah bertanggung jawab langsung dalam melakukan upaya perlindungan terhadap ancaman dari segala ancaman dan bahaya yang akan menyebabkan kerugian baik nyawa ataupun harta benda. Seperti perlindungan dalam bentuk tanggap darurat bencana menjadi tugas Pemerintah dalam memberikan perlindungan dengan baik melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kotamadya dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Badan Penanggulangan Bencana dibentuk di wilayah Kabupaten Majene, yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2010. Berdasarkan kondisi geografis, wilayah Kabupaten Majene, termasuk dalam potensi bencana, baik bencana alam, non alam, yang berdampak bagi manusia yang dapat menimbulkan gangguan, ancaman, kerusakan, hingga korban jiwa dan lingkungan.

Karena Kabupaten Majene sering mengalami gempa bumi tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang akan terulang kembali, maka penting bagi penduduk Kabupaten Majene untuk mewaspadaai potensi Bahaya bencana yang sering terjadi, maka dari itu perlunya pengetahuan mengenai kesiapsiagaan bagi masyarakat setempat untuk menghadapi bahaya dari bencana yang akan datang. Oleh karena itu, meningkatkan kesiapsiagaan sebagai langkah utama untuk menurunkan risiko bencana yang terjadi adalah langkah yang baik. Kesiapsiagaan bencana sangat penting untuk meminimalisir jumlah korban jiwa. gempa bumi sampai saat ini belum dapat di prediksi dimana dan kapan akan terjadi sehingga peristiwa ini tidak dapat di cegah namun peristiwa ini dapat dikurangi atau di minimalisir dampak akibat gempa bumi.

Dalam upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Majene, Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bekerja sama langsung dengan BMKG, TNI, Polri, Damkar, Satpol PP, Perhubungan serta unsur lainnya, melaksanakan pelatihan dan simulasi dalam menghadapi bencana gempa bumi yang berbasis pelajar yang melibatkan 15 sekolah yang ada di kabupaten majene baik itu dari tingkat TK, SD, SLTP, dan SLTA. Simulasi ini dilakukan berjuan untuk memberikan edukasi atau pengetahuan kepada para pelajar mengenai tindakan apa yang tepat dalam menghadapi bencana

gempa bumi, dengan adanya pengetahuan yang dimiliki para pelajar diharapkan dapat meminimalisir korban jiwa maupun luka-luka.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap bencana gempa bumi di Kabupaten Majene Sulawesi Barat. Dilihat dari potensi luas bahaya bencana gempa bumi di Kabupaten Majene pada tiap-tiap kecamatan, kelas bahaya tersebut terdiri dari kelas rendah, sedang, dan tinggi. Tinggi rendahnya dampak bencana gempa bumi dapat dilihat dari cakupan luas wilayah yang terdampak bencana dan seberapa besar dampak kerugian yang ditimbulkan akibat bencana tersebut. Hasil potensi luas bahaya gempa bumi per kecamatan di Kabupaten Majene adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Potensi Bahaya Gempa Bumi Per Kecamatan
di Kabupaten Majene Tahun 2018

No.	Kecamatan	Bahaya (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Luas	Kelas
1	Banggae	-	-	2.515,00	2.515,00	Tinggi
2	Banggae Timur	-	1.583,70	1.420,30	3.004,00	Tinggi
3	Malunda	11.172,14	6.292,18	1.300,67	18.765,00	Tinggi
4	Pamboang	-	5.083,02	1.935,98	7.019,00	Tinggi
5	Sendana	-	7.879,40	344,60	8.224,00	Tinggi
6	Tammerodo	-	5.540,00	-	5.540,00	Sedang
7	Tubo Sendana	-	4.117,00	-	4.117,00	Sedang
8	Ulumanda	22.878,14	22.721,86	-	45.600,00	Sedang
Kab. Majene		34.050,28	53.217,16	7.516,56	94.784,00	Tinggi

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Majene.

Tabel diatas memperlihatkan potensi luas wilayah bahaya gempa bumi per kecamatan yang terpapar bencana gempa bumi. Kelas bahaya gempa bumi Kabupaten Majene ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kecamatan yang terdampak gempa bumi, yang di mana menunjukkan 8 kecamatan berada pada bahaya kelas tinggi dan 3 kecamatan bahaya kelas sedang. Total luas bahaya gempa bumi di Kabupaten Majene secara keseluruhan adalah 94.784,00 Ha, dan berada pada kelas tinggi. Secara terperinci, luas bahaya dengan kelas rendah adalah 34.050,28 Ha, kelas sedang seluas 53.217,16 Ha, sedangkan luas potensi bahaya gempa bumi pada kelas tinggi adalah 7.516,56 Ha. Potensi bahaya gempa bumi tersebut merupakan luas cakupan wilayah yang mempunyai kondisi rentan terhadap bencana gempa bumi berdasarkan kajian bahaya.

Bencana gempa bumi yang baru terjadi beberapa waktu lalu di Kabupaten Majene sebanyak dua kali yakni pada tanggal 14 Januari 2021 dengan magnitudo 5,9 SR dan terjadi lagi pada tanggal 15 Januari 2021 dengan magnitudo 6,2 SR. Gempa bumi tersebut disebabkan *Mamuju Thrust* atau sesar naik mamuju yang pada tahun 1969 juga menjadi penyebab gempa bumi di Kabupaten Majene

dengan kekuatan 6,9 SR hingga menyebabkan 64 meninggal dunia, 97 luka-luka, 1.287 bangunan rusak. Bencana gempa bumi yang terjadi Kabupaten Majene tahun 2021 berdampak pada 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Malunda, Ulumanda, Tammeroddo Sendana, Tubo Sendana, dan Sendana. Bencana ini mengakibatkan 11 (sebelas) orang meninggal dunia, 3 (tiga) orang belum ditemukan, 1.474 orang luka-luka, mengungsi 25.416 orang serta mengakibatkan kerusakan pada rumah, sarana dan prasarana serta fasilitas umum dan sosial dengan tingkat kerusakan sedang maupun ringan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian Muh. Akbar 2019, yang berjudul “Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Longsor Di Desa Tabbinjai kecamatan Tombo Lopao Kabupaten Gowa”, menjelaskan bahwa kesiapsiagaan dan faktor penghambat masyarakat Desa Tabbinjai Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa dalam menghadapi bencana longsor. Persamaan, terletak pada kesamaan dalam kesiapsiagaan dan faktor penghambat masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Perbedaan, terdapat pada lokasi penelitian dan penelitian ini lebih mencakup kepada bencana longsor. Serta terletak pada waktu penelitian.

Penelitian dari Karmila 2017, yang berjudul “Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Gowa” memiliki tujuan untuk mengetahui upaya badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) terhadap penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Gowa dan untuk mengetahui faktor penghambat badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) terhadap penanggulangan banjir di Kabupaten Gowa. Persamaan, kesamaan penelitian ini terletak dalam pembahasan yang menyangkut tentang penanggulangan bencana, dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengantisipasi suatu bencana. Perbedaan, terdapat pada lokasi penelitian dan penelitian ini lebih berfokus pada kesiapsiagaan penanganan bencana banjir.

Penelitian dari Adi Sucipto 2019, yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung Di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung”, menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi bencana oleh badan penanggulangan bencana daerah dalam bentuk penyadaran, penguatan, dan pendayaan, faktor yang mendukung dan menghambat pemberdayaan tersebut, serta hasil yang dicapai dari program pemberdayaan masyarakat tersebut. Perbedaan, terdapat pada lokasi penelitian yang terletak di Kota Bandar Lampung di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, penelitian ini melihat bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan BPBD sebagai wujud mitigasi bencana secara umum.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih mempertimbangkan aspek sosial dan budaya dalam penelitian dan yang terjadi di lokus penelitian. Selain itu, penulis lebih fokus pada faktor-faktor baru yang muncul dalam konteks masa kini yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada faktor-faktor yang sudah diketahui sebelumnya.

1.5. Tujuan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap bencana gempa bumi di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, faktor penghambat serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, hal ini karena peneliti ingin menjelaskan bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi saat penelitian berlangsung sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bodgan dan Taylor (Lexy J. Moeleong, 2011:4) mendefenisikan yaitu sebagai prosedur penelitian yang berupa lisan maupun tulisan sehingga menghasilkan data deskriptif (data yang menggambarkan) dari orang, dan perilaku yang dapat di amati.

Pendekatan induktif telah dipilih, yaitu metode penalaran yang dimulai dengan pernyataan spesifik dan membangun argumen umum. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dikarenakan permasalahan yang dihadapi sangat beragam, dalam merumuskan masalah perlu dilakukan pendalaman sehingga peneliti dapat memperoleh data yang lebih lengkap dan lebih jelas. Penelitian ini membahas mengenai kesiapsiagaan BPBD terhadap gempa bumi dapat dilihat dari pengetahuan dan sikap mengenai risiko bencana, rencana tanggap darurat, system peringatan bencana, dan mobilitas sumber daya. Dengan keterangan tersebut peneliti mengambil kesimpulan bagaimana kesiapsiagaan BPBD terhadap bencana gempa bumi di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.

Melalui metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap bencana gempa bumi di Kabupaten Majene Sulawesi Barat termasuk masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya dan juga upaya dalam mengatasinya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini informan ditentukan melalui teknik *purposive dan snowball sampling*. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang dianalisis menggunakan teori Kesiapsiagaan oleh LIPI berkerjasama dengan UNESCO yang terdiri dari 4 (empat) dimensi yaitu: Pengetahuan dan sikap tentang risiko bencana; rencana tanggap darurat; sistem peringatan bencana dan mobilisasi sumber daya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi dengan beberapa informan baik dari perangkat BPBD Kabupaten Majene serta masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan terjadi bencana gempa bumi, dan juga menggunakan cara dokumentasi untuk lebih memperkuat keabsahan data yang sudah di peroleh melalui penelitian. Pada penelitian ini yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap bencana gempa bumi di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.

3.1 Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap bencana gempa bumi di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat

Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Majene selama ini sudah baik, namun kesiapsiagaan masih perlu ditingkatkan, sebab semakin baik kesiapsiagaan BPBD dalam menangani bencana gempa bumi maka akan semakin siap dalam bertindak cepat, tepat serta efektif dan efisien.

3.1.1 Pengetahuan dan Sikap tentang Risiko Bencana

Tingkat pengetahuan masyarakat sangat berpengaruh terhadap kesiapan masyarakat dan kepedulian masyarakat dalam penanggulangan dan menghadapi bencana, khususnya bencana gempa bumi yang sering terjadi akhir-akhir ini, yang menimpah masyarakat yang berada di daerah rawan terjadi bencana. warga Kabupaten Majene sangat paham mengetahui tentang gempa bumi, dan bahaya apa saja yang ditimbulkannya, serta apa yang perlu dilakukan jika terjadi gempa, berdasarkan pernyataan di atas. Menurut teori LIPI UNESCO/ISDR, pengetahuan berkembang sebagai hasil dari

pengalaman langsung individu terhadap gempa bumi yang pernah dialami. Pengetahuan juga dapat diperoleh melalui penyuluhan, sosialisasi dan pendidikan, Masyarakat setempat sudah memiliki banyak pengalaman terhadap bencana gempa bumi dan sosialisasi serta simulasi yang di lakukan.

3.1.2 Rencana Tanggap Darurat

Tanggap Darurat menurut LIPI-UNESCO/ISDR adalah suatu tindakan yang dilaksanakan dengan cepat dan tepat mungkin. Dalam hal tersebut untuk dapat mengetahui Tanggap Darurat. Majene merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana gempa, dan juga memiliki peluang terjadinya tsunami, gempa kemarin bukan yang pertama terjadi atau yang terbesar, gempa juga pernah terjadi pada tahun 1969 juga menjadi penyebab gempa bumi di Kabupaten Majene dengan kekuatan sekitar 6,6 lebih yang menyebabkan korban jiwa dan bangunan rusak. Di tengah rawan bencana di Majene, meski belum diklasifikasikan sebagai tsunami. Untuk jalur evakuasi hampir setiap persimpangan memiliki jalur evakuasi yang ditetapkan, yang mengarah ke lokasi tempat orang dapat berkumpul dengan aman, seperti bangunan evakuasi, lapangan, dan ke tempat yang lebih tinggi.” Dalam mengedukasi masyarakat tentang kesiapsiagaan hampir setiap tahun diberikan simulasi kebencanaan di sekolah-sekolah dan perkantoran juga diberikan pelatihan. Mengingat seberapa sering gempa bumi terjadi di daerah Majene, sangat penting untuk membuat semua dokumen penting di siapkan dalam *soft copy* dan menyimpannya di lokasi yang aman dan mudah untuk diakses. Berbagai lingkup baik di BPBD, Camat, maupun kepala desa sudah menerapkan rencana tanggap darurat ini dengan baik sesuai yang kita lihat dari hasil wawancara di atas. Hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang menyatakan bahwa penetapan kebijakan pembangunan yang rawan bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

3.1.3 Sistem Peringatan Bencana

Tujuan dari Sistem Peringatan Dini adalah untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat sesegera mungkin terhadap situasi yang dapat mengakibatkan kerugian atau korban jiwa. Menurut LIPI-UNESCO/ISDR, sistem ini terdiri dari peringatan dan penyebaran informasi, dan dengan bantuan peringatan ini, masyarakat dapat meminimal mungkin kerusakan lingkungan sekaligus mengurangi kerugian harta benda dan korban jiwa. Dalam peringatan dini ini sudah sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan dengan teori yang dikemukakan oleh LIPI-UNESCO/ISDR bahwa sistem peringatan dini terdiri dari tanda peringatan dan penyebaran informasi sesuai dengan apa yang di lapangan. (*Warning Receiver System*) WRS adalah sistem peringatan yang sangat bermanfaat dalam memberikan peringatan dini karna ketika gempa terjadi yang berpotensi tsunami maka sirine berbunyi dengan otomatis. Sistem pemberitahuan dini diuji sebagai salah satu langkah tanggap darurat dan kesiapsiagaan bencana, sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 45, tentang Kesiapsiagaan. Dapat dikatakan bahwa sistem peringatan dini efektif dan sudah memenuhi persyaratan.

3.1.4 Mobilisasi Sumber Daya

Sumber daya manusia yang ada di kantor BPBD sudah sangat memiliki pengalaman yang lebih di karenakan sudah melalui pelatihan khusus, dan dana darurat siap pakai selalu tersedia jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Untuk sarana dan prasarana di kantor BPBD sudah termasuk di bilang lengkap, dan peralatan saat ini dalam kondisi sangat baik.karna dilakukan perawatan yang rutin. Di tingkat kecamatan menunjukkan perbandingan terbalik antara kantor BPBD dengan sarana prasarana yang ada di kecamatan masih kurang memadai untuk dapat menunjang kesiapsiagaan masyarakat. Seperti masih kurangnya terpal, dan tidak adanya gergaji mesin, begitu juga dana anggaran yang masih minim serta kurang mencukupi. Jika terjadi bencana, pihak sebagianKecamatan hanya bisa

menunggu dari BPBD langsung, namun untuk Sumber Daya Manusia di sebagian Kecamatan sudah diajarkan untuk dapat menghadapi bencana. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Majene No. 4 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, tertulis mengenai upaya dalam rangka mendukung untuk pengurangan atau meminimalisir risiko bencana, Pemerintah Daerah menyediakan Dana Siap Pakai yang disebut DSP dalam anggaran penanggulangan bencana dari APBD yang masuk dalam anggaran BPBD, disediakan saat sebelum terjadi bencana, pada tanggap darurat, dan setelah terjadi bencana. Anggaran dasar organisasi, menyatakan bahwa untuk tujuan mengurangi risiko bencana harusnya kegiatan sesuai dengan itu. Sarana prasarana dan pendanaan seharusnya tidak menjadi masalah lagi, apalagi kekurangan. Pemerintah perlu memperhatikan masalah ini ke depannya agar kita bisa lebih siap dan lebih baik lagi.

3.2 Faktor Penghambat dalam menghadapi bencana gempa bumi di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat

3.2.1 Kurang Lengkap Sarana dan Prasarana

Alat sarana prasarana yang memadai dalam penanggulangan bencana akan sangat membantu untuk menunjang keberhasilan pengurangan risiko bencana dalam menangani gempa bumi dengan baik. Penanganannya bencana tidak akan sebaik mungkin jika alat yang diperlukan tidak lengkap atau tidak tersedia. Untuk alat perlengkapan sarana prasarana yang ada di Kabupten Majene masih kurang memadai, seperti contohnya tidak adanya alat berat seperti truk kami juga belum dapat memperbaharui alat-alat yang sudah rusak karna terbatasnya anggaran, untuk itu kami dari pihak BPBD sudah sering mengajukan untuk pengadaan alat berat tersebut. Untuk dapat lebih memudahkan penanganan penanggulangan bencana namun kelanjutannya mengenai hal tersebut masih belum ada respon dari pihak Pemerintah Daerah. Kurangnya sarana prasarana, serta anggaran dan SDM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene, menjadi kendala-kendala yang membatasi kemampuan BPBD Kabupaten Majene untuk menggerakkan personel dalam pelaksanaan mitigasi bencana gempa bumi, Karena itu, pihak dari BPBD hanya bisa menggunakan saran dari Instansi lain, seperti TNI dan Polri menyalurkan bantuan misalnya tenda pengungsian saat jika sewaktu-waktu terjadi bencana serta menunggu datangnya bantuan dari pihak BNPB.

3.2.2. Kurangnya Anggaran Kebencanaan

Terkait dengan anggaran ini merupakan salah satu penghambat dalam penanggulangan bencana, yang kami hadapi di BPBD anggaran juga menentukan keberhasilan dalam mempercepat proses pemulihan setelah bencana maupun pengurangan risiko bencana, kami di BPBD walaupun anggaran kebencanaan cukup tinggi, masih dinilai kurang karna seringnya terjadi bencana dan mencakup kerusakan wilayah cukup luas. Misalnya, saja dalam memberikan edukasi simulasi tentang bencana gempa bumi yang berpotensi tsunami belum bisa terlaksanakan karena membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan simulasi tersebut yang melibatkan instansi lain. Terkait dengan pernyataan di atas, sangat disayangkan karna letak Kabupaten Majene begitu dekat dengan laut, dengan keterbatasan anggaran, akibatnya Kabupaten Majene sulit dalam mengambil keputusan dan tidak dapat cepat untuk menerapkan penanggulangan bencana. Keterbatasan anggaran juga sangat mempengaruhi sumber daya manusia dan keterbatasan sarana prasarana menyebabkan kurang efektifnya mitigasi bencana yang terlaksana di lapangan.

3.3. Upaya BPBD Dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Majene

Strategi daerah dalam menangani bencana gempa bumi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini merupakan langkah awal yang diperlukan dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana gempa bumi di Kabupaten Majene. Untuk melaksanakan upaya

peningkatan kesiapsiagaan tersebut, sangat penting memastikan bahwa peraturan saat ini sejalan dengan kebijakan yang terlaksana, hal ini bertujuan untuk mempermudah penanganan bencana gempa bumi dan mendukung terciptanya penanggulangan bencana lebih baik dan terarah dalam mengelola kebijakan, rancangan strategi, dan kegiatan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan Kesiapsiagaan masyarakat, seperti program Desa tanggu Bencana yang sudah ada, serta Tim Reaksi Cepat yang sudah terlatih dan berpengalaman, Masyarakat Majene tidak terlalu takut ketika gempa terjadi dikarenakan BPBD sudah membekali kepada masyarakat umum mengenai edukasi kesiapsiagaan, dan tempat serta jalan evakuasi yang sudah ditentukan sehingga masyarakat sudah tau dan langsung berkumpul ditempat yang sudah di tetapkan. BPBD juga membuat program penanaman dini bagi pelajar di setiap sekolah-sekolah mulai dari sekolah SD sampai SMA, Semua ini dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan para pelajar dalam menghadapi bencana.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang membahas tentang kesiapsiagaan, yaitu suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui perencanaan dan dengan mengambil langkah-langkah yang berdaya guna dan tepat guna. Sesuai dengan Undang-undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa BPBD telah melakukan tugasnya dengan semaksimal mungkin. Seiring berjalannya waktu Kabupaten Majene agar dapat menjadi lebih siap lagi dalam menghadapi bencana gempa bumi.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap bencana gempa bumi di Kabupaten Majene Sulawesi Barat perlu dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku agar pada saat penanggulangan bencana menjadi lebih efektif. Persamaan dengan penelitian sebelumnya terletak dalam pembahasan yang menyangkut tentang langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam penanggulangan bencana, dan peningkatan kemampuan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi suatu acaman bencana, sehingga upaya badan penanggulangan bencana daerah terhadap penanggulangan bencana alam perlu peningkatan untuk meminimalisir dampak-dampak yang akan timbul dari bencana. seperti program sosialisasi dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran seluruh elemen masyarakat terhadap musibah bencana yang menjadi ancaman stabilitas Pemerintah Daerah Nasional, maka perlu meningkatkan kesiapsiagaan sebagai langkah utama untuk menurunkan risiko bencana yang terjadi adalah langkah yang baik. Kesiapsiagaan bencana sangat penting untuk meminimalisir jumlah korban jiwa

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan bahwa walaupun anggaran kebencanaan cukup tinggi, masih dinilai kurang karna seringnya terjadi bencana dan mencakup kerusakan wilayah cukup luas.

IV. KESIMPULAN

Penelitian yang dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene yang menjadi pokok pembahasan terkait dengan kesiapsiagaan badan penanggulangan bencana daerah terhadap bencana gempa bumi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Majene selama ini sudah baik, namun kesiapsiagaan masih perlu ditingkatkan, sebab semakin baik kesiapsiagaan BPBD dalam menangani bencana gempa bumi maka akan semakin siap dalam bertindak cepat, tepat serta efektif dan efisien. Kabupaten Majene merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana gempa, dan juga memiliki peluang terjadinya tsunami, gempa kemarin bukan yang pertama terjadi atau yang terbesar, gempa juga pernah terjadi pada tahun 1969 juga menjadi penyebab gempa bumi di Kabupaten Majene dengan kekuatan sekitar 6,6 lebih yang menyebabkan korban jiwa dan bangunan rusak. Untuk faktor penghambat itu sendiri

terdapat alat perlengkapan sarana prasarana yang ada di Kabupten Majene masih kurang memadai, seperti contohnya tidak adanya alat berat seperti truk kami juga belum dapat memperbaharui alat-alat yang sudah rusak karna terbatasnya anggaran, untuk itu kami dari pihak BPBD sudah sering mengajukan untuk pengadaan alat berat tersebut. Untuk dapat lebih memudahkan penanganan penanggulangan bencana namun kelanjutannya mengenai hal tersebut masih belum ada respon dari pihak Pemerintah Daerah. Selain faktor penghambat yaitu sarana dan prasarana terdapat juga Anggaran yang masuk dalam faktor penghambat, ini merupakan salah satu penghambat dalam penanggulangan bencana, yang kami hadapi di BPBD anggaran juga menentukan keberhasilan dalam mempercepat proses pemulihan setelah bencana maupun pengurangan risiko bencana, kami di BPBD walaupun anggaran kebencanaan cukup tinggi, masih dinilai kurang karna seringnya terjadi bencana dan mencakup kerusakan wilayah cukup luas.

Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan Kesiapsiagaan masyarakat, seperti program Desa tanggu Bencana yang sudah ada, serta Tim Reaksi Cepat yang sudah terlatih dan berpengalaman, Masyarakat Majene tidak terlalu takut ketika gempa terjadi dikarenakan BPBD sudah membekali kepada masyarakat umum mengenai edukasi kesiapsiagaan, dan tempat serta jalan evakuasi yang sudah ditentukan sehingga masyarakat sudah tau dan langsung berkumpul ditempat yang sudah di tetapkan

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap bencana gempa bumi di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala BPBD Kabupaten Majene beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penangulungan Bencana Daerah Kabupaten Majene
- Adi Sucipto dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun (2019) “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung Di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.”
- Karmila, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2017) “Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daereh terhadap Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Gowa”
- Muh. Akbar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2019) “Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Longsor Di Desa Tabbinjai Kecamatan Tombo Lopao Kabupaten Gowa
- UNESCO/ISDR, LIPI –, *KAJIAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT*, 2006 Widyananda, Rakha fahreza, 8 Jenis Penelitian Kualitatif Dalam Karya Tulis“, Senin, 18 Januari 2021 19:20 [accessed 7 September 2021]

